



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI** *Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PENGENDALIAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN GENERASI MUDA

**Poedji Poerwanti**

Analisis Kebijakan Ahli Muda  
[poedji.purwanti@dpr.go.id](mailto:poedji.purwanti@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan bahwa pada Januari 2025, Polri telah menindak sebanyak 3.936 kasus narkoba di Indonesia. Seluruh kepolisian daerah (Polda) turut melakukan penindakan di wilayah masing-masing, dengan Polda Sumatera Utara mencatat jumlah kasus terbanyak, yaitu 447 kasus atau sekitar 11,35 persen dari total penindakan. Sebaliknya, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi satuan kerja dengan jumlah penindakan paling sedikit, yaitu 5 kasus.

Dari data tersebut, ratusan pelajar dan mahasiswa tercatat sebagai terlapor dalam kasus narkoba. Pusiknas Bareskrim Polri melaporkan, sebanyak 821 pelajar dan mahasiswa terlibat dalam kasus narkoba pada Januari 2025. Angka ini mengalami peningkatan 90,93 persen dibandingkan dengan jumlah pelajar dan mahasiswa yang menjadi terlapor kasus narkoba pada Desember 2024. Jumlah ini mencerminkan semakin banyaknya kalangan pelajar dan mahasiswa yang terjerat dalam kasus narkoba. Jika dibandingkan dengan data tahun 2024, di mana terdapat 7.319 pelajar dan mahasiswa yang menjadi terlapor, angka kasus pada Januari 2025 sudah mencapai 11,21 persen dari total kasus narkoba di sepanjang tahun 2024.

Meningkatnya keterlibatan generasi muda dalam kasus narkoba menjadi perhatian bagi pihak berwenang. Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Data (PID) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Tjahyono Saputro, menyatakan bahwa generasi milenial dan generasi Z menjadi target utama para pengedar dan bandar narkoba. Kondisi ini menimbulkan ancaman serius terhadap masa depan generasi muda.

Berbagai faktor dapat mendorong generasi muda mencoba narkoba, seperti pengaruh lingkungan dan ketidakharmonisan dalam keluarga, yang menjadi faktor utama penyebab terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Dampak buruknya mencakup kerusakan kesehatan fisik, mental, dan sosial, yang pada akhirnya mengancam produktivitas, keamanan, dan stabilitas sosial, bahkan berpotensi memicu tindak kejahatan.

Menindaklanjuti ancaman ini, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, telah memerintahkan jajarannya untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba hingga ke akar-akarnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memantau daerah-daerah yang menjadi wilayah singgah dan pintu masuk peredaran narkoba. Kapolri menegaskan bahwa pemberantasan narkoba harus dilakukan secara maksimal, terutama di wilayah yang memiliki angka pengguna narkoba tertinggi. Pengawasan terhadap penyelundupan narkoba juga harus ditingkatkan guna menangkal masuknya narkoba ilegal dari luar negeri.

Tingginya angka pengguna narkoba di Indonesia dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan jenis narkotika di dunia. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama Badan Narkotika Nasional (BNN),

Agus Irianto, menyatakan bahwa lebih dari 1.262 jenis narkotika baru telah teridentifikasi secara global, sementara di Indonesia terdapat 97 jenis narkotika baru. Selain itu, kondisi geografis Indonesia yang luas dan terbuka semakin memperbesar peluang peredaran narkoba secara ilegal. Oleh karena itu, Polri memandang perlu untuk mengefektifkan program Kampung Bebas Narkoba. Hingga saat ini, terdapat 205 kampung yang tengah diupayakan untuk diubah menjadi kawasan bebas narkoba. Program ini diharapkan dapat memutus rantai peredaran narkoba di Indonesia dan melindungi masa depan generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkotika.

## Atensi DPR

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan narkotika. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah upaya pencegahan di kalangan generasi muda dan anak usia sekolah. Oleh karena itu, meningkatnya kasus narkoba di kalangan pelajar, mahasiswa, dan generasi muda perlu mendapat perhatian.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Komisi III DPR RI dapat menyampaikan dalam rapat kerja dengan Polri dan BNN mengenai komitmen tentang upaya pencegahan, pemberantasan, serta pengendalian penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Selain itu, Komisi III DPR RI dapat lebih mendorong kebijakan pemberantasan narkoba, seperti memperkuat satuan tugas (Satgas) narkoba di tingkat nasional hingga daerah, termasuk meningkatkan pengawasan di wilayah rawan dan pintu masuk penyelundupan narkoba. Upaya lainnya adalah memastikan adanya program pencegahan berbasis edukasi melalui penyuluhan tentang bahaya narkoba. Selain itu, akses rehabilitasi perlu diperluas agar para pengguna dapat memperoleh pemulihan dan tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

## Sumber

bnn.go.id, 13 Februari 2025;  
lombokprime.com, 15 Februari 2025; dan  
polri.go.id, 12 Februari 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament*  
*Evidence Based Policy Making*